



REFORMED CENTER FOR
RELIGION & SOCIETY

SOCIETAS DEI JURNAL AGAMA DAN MASYARAKAT

**Vol. 12, No. 2
Oktober 2025**

p-ISSN: 2407-0556
e-ISSN: 2599-3267

**EDITORIAL:
Pegiat Perdamaian:
Dari Ideologi Menuju Visi Politik**

Semy Arayunedya 

Reformed Center for Religion and Society,
Indonesia

Korespondensi

semyarayunedya@rcrs.org

DOI

<https://doi.org/10.33550/sd.v12i2.578>

Halaman

i-iv

Abstrak

Studi perdamaian dan agama tidak dapat dilepaskan dari kajian politik karena sebagian besar kita hidup di negara atau komunitas politik, yaitu komunitas yang mengikat warga negara dan pemerintah yang setidaknya bertujuan menegakkan dan memelihara keadilan. Dengan kata lain, para pegiat perdamaian akan bersinggungan dengan politik, baik itu di tingkat operasionalisasi maupun ideologinya. Yang pertama bermuara pada kebijakan publik. Pemetaan aktor dan relasi di antaranya adalah nilai plus yang diperoleh para pegiat sebagai keterampilan lanjutan. Setelahnya, ideologi merupakan hal yang mutlak dipelajari karena ialah yang menelurkan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan perdamaian atau, sebaliknya, kekerasan.

Kata-kata kunci: pegiat perdamaian, ideologi politik, visi politik.

Studi perdamaian dan agama tidak dapat dilepaskan dari kajian politik karena sebagian besar kita hidup di negara atau komunitas politik, yaitu komunitas yang mengikat warga negara dan pemerintah yang setidaknya bertujuan menegakkan dan memelihara keadilan. Dengan kata lain, para pegiat perdamaian akan bersinggungan dengan politik, baik itu di tingkat operasionalisasi maupun ideologinya. Yang pertama bermuara pada kebijakan publik. Pemetaan aktor dan relasi di antaranya adalah nilai plus yang diperoleh para pegiat sebagai keterampilan lanjutan. Setelahnya, ideologi merupakan hal yang mutlak dipelajari karena ialah yang menelurkan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan perdamaian atau, sebaliknya, kekerasan.

Setelah perang ideologi antara komunisme dan demokrasi liberal berakhir, masa pascamodern memunculkan ideologi-ideologi yang menekankan posisi konkret seseorang dalam hidup—baik kelas ekonomi, gender, orientasi seksual, religiositas, ataupun ras—menentukan pandangan dunianya secara keseluruhan. Hal ini telah mendorong apa yang kemudian disebut dengan berbagai istilah, seperti politik perbedaan (*politics of difference*), politik pengakuan (*politics of recognition*), atau politik identitas (*identity politics*).¹ Kategorisasi itu dinaungi dan dipelihara dengan baik oleh ideologi relativisme, pluralisme, nasionalisme etnis, ekstremisme agama, dan sejenisnya.

Di samping itu, ideologi liberalisme dan neoliberalisme masih sangat memengaruhi implementasi program-program yang bertajuk agama dan perdamaian secara global. Pada fase liberalisme, agama dibingkai oleh nilai-nilai liberal yang mengusung para tokoh agama. Tahap ini menekankan rekonsiliasi, toleransi, dan transformasi yang digerakkan oleh individu-individu tersebut. Setelahnya, fase neoliberalisme memandang agama sebagai kapital atau kekuatan lunak (*soft power*). Modal itu digunakan sebagai sesuatu yang dapat diukur, dikemas, dan diterapkan untuk mencapai tujuan perdamaian dan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Masalahnya, kedua ideologi itu membawa program-program perdamaian yang berorientasi pada pragmatisme utilitas, birokratisasi, agama yang terdepolitisasi, target pendonor, dan ketahanan individu daripada keadilan struktural. Penerapan agama secara utilitarian cenderung mengesampingkan analisis teologis dan politik kritis tentang makna agama dan interaksi agama dengan struktur kekuasaan. Agama direduksi menjadi alat untuk mencapai perdamaian sebagaimana didefinisikan oleh kerangka kerja pendonor, alih-alih sebagai fenomena sosial dan ideologis yang kompleks.²

Dalam upaya menolak utilisasi dan depolitisasi agama—di tengah polarisasi liberalisme dan konservatisme agama pada masanya—Bruegemann menawarkan kesadaran alternatif. Kecenderungan pihak liberal adalah peduli pada politik yang mengejawantahkan keadilan dan belas kasihan, tetapi sebagian besar mereka tidak tertarik pada kedaulatan Tuhan. Di pihak lainnya, kecenderungan konservatif adalah sangat peduli pada kedaulatan Tuhan, tetapi tanpa kritik sosial, sehingga gagal melihat implikasinya pada penindasan dan ketidakadilan. Dengan kondisi itu, ia mengajak kita untuk melihat hubungan antara triumfalisme agama yang statis dan politik penindasan

¹ David Koyzis, *Political Visions & Illusions*, (IVP Academic, 2019), 3.

² Atalia Omer, "Religion and the Study of Peace: Practice without Reflection," *Religions* 12, no. 12 (2021): 1069, <https://doi.org/10.3390/rel12121069>.

eksploitatif yang digambarkan melalui kisah penindasan bangsa Israel oleh bangsa Mesir pada zaman Musa. Di Mesir, triumfalisme itu ditunjukkan dengan ketertiban masyarakat yang diajarkan oleh para nabi mereka untuk menekan produksi batu bata dan melanggengkan kemakmuran raja serta pejabatnya.³ Di level ideologis, kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menormalisasi kelindan antara triumfalisme agama yang statis dan politik penindasan itu hanya dapat dipatahkan dengan kesadaran alternatif (*prophetic consciousness*) yang mengonfrontasi *status quo* ketidakadilan dan "ketertiban".

Pada tingkat itu pula, berbagai ideologi politik dirumuskan untuk menjawab persoalan tentang ketidakadilan, tujuan bernegara, dan maknanya bagi kehidupan manusia. Demi meraih tujuannya, ideologi politik sering kali digunakan untuk memutlakkan otonomi individu, mayoritas suara rakyat, kesetaraan ekonomi, tatanan sosial, atau superioritas suatu bangsa. Dengan kata lain, ideologi politik diklaim dapat menyelamatkan (soteriologis) dan mencapai tujuan akhir (eskatologis) walaupun darah tertumpah. Jadi, ideologi politik rawan diberhalakan karena mengandaikan asumsi dan narasi dasar yang memandang manusia sebagai aktor utama untuk mewujudkan keselamatan para pengikutnya dengan menghalalkan segala cara agar mencapai tujuannya.⁴

Lalu, apa ideologi yang sebaiknya dipegang oleh para pegiat perdamaian? Baik revolusi maupun kontra revolusi, masing-masing pihak memegang kemutlakan ideologi tertentu. Sebaliknya, para pegiat yang memang acap kali bekerja di tengah dilema perlu menisbikan ideologi politik.⁵ Dengan begitu, para pegiat adalah seorang yang kritis karena ia bukan loyalis. Akan tetapi, apakah sikap tersebut membuat para pegiat bekerja tanpa arah? Dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ideologi politik yang bagaimanapun juga dirancang melalui perenungan mendalam untuk kemaslahatan bersama dan menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan, ideologi politik cenderung eksklusif, otoritarian, uniform, dan ilusif. Alternatifnya, para pegiat menggantinya dengan visi politik yang inklusif, partisipatif, pluriform, dan faktual.

Oleh sebab itu, edisi kali ini hendak menggiatkan perdamaian melalui penyebarluasan artikel-artikel yang selaras dengan visi tersebut. Artikel pertama dipresentasikan oleh Frans Paillin Rumbi yang mendiskusikan Kristologi Pangala Tondok di tengah-tengah interdenominasi dan antaragama di Toraja. Hasil penelitian itu menjadi landasan penulis untuk menawarkan dialog yang konstruktif dalam konteks multireligius tersebut. Pada artikel kedua, Daniel Fajar Panuntun meneliti ambiguitas antropologi-metafisika manusia setelah kematian dengan mengonstruksi pandangan *posse mori in posse non mori* (dapat mati dalam dapat tidak mati) untuk melengkapi pandangan *posse mori et posse non mori* (dapat mati dan dapat tidak mati) yang diusung oleh Brink. Selanjutnya, Denni Boy Saragih dan Arlina Permata Wiguna menuliskan artikel ketiga untuk menganalisis poin-poin tentang teknologi reproduksi dengan bantuan di dalam Permenkes Kespro No. 2 Tahun 2025. Tulisan yang mendiskusikan status moral embrio (nonpersonal, prapersonal, dan personal) ini ditujukan untuk membuktikan argumen mereka tentang pembelaan manusia sejak awal keberadaannya

³ Walter Brueggemann, *The Prophetic Imagination*, (Fortress Press, 2018).

⁴ Koyzis, *Political Visions & Illusions*, 16.

⁵ Saul Alinsky, *Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals* (London: Vintage, 1971), 10-11.

yang perlu diakomodasi di peraturan terkait. Setelahnya, Laura Precious Bless dan Karel Karsten Himawan dalam artikel keempat melibatkan ratusan partisipan di Jabodetabek untuk menunjukkan bahwa orientasi religius ekstrinsik secara signifikan memprediksi tingkat sensitivitas jijik yang lebih tinggi. Kontribusi studi ini dapat menjadi acuan bagi umat beragama di Jabodetabek mengenai cara pandang terhadap ajaran agama memiliki kontribusi pada perasaan jijik. Di artikel terakhir, Dwi Maria Handayani menggunakan analisis tematik untuk menunjukkan bahwa teologi biblikal dapat menjadi dasar kritik profetis, sekaligus inspirasi teologis bagi perjuangan keadilan agraria di Indonesia. Dengan hal itu, penulis menawarkan dua kebaruanya: Mazmur ditempatkan sebagai sumber utama teologi tanah yang membentuk kerangka profetis bagi keadilan agrarian dan teologi tanah dikontekstualisasikan secara langsung dari Mazmur pada isu mafia tanah di Indonesia.

Referensi

- Alinsky, Saul. *Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals*. London: Vintage, 1971.
- Brueggemann, Walter. *The Prophetic Imagination*. 40th ed. Reprint, Fortress Press, 2018.
<https://www.perlego.com/book/1734314>.
- Koyzis, David. *Political Visions & Illusions*. 2nd ed. 2019. Reprint, IVP Academic, 2019.
<https://www.perlego.com/book/983614>.
- Omer, Atalia. "Religion and the Study of Peace: Practice without Reflection." *Religions* 12, no. 12 (2021): 1069. <https://doi.org/10.3390/rel12121069>.